

| NO | NAMA PELAYANAN | PROSEDUR PELAYANAN | PERSYARATAN | BIAYA (Rp) | WAKTU | DASAR HUKUM | KET |
|----|--|---|---|------------|---------------|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Sosialisasi Pengawasan Intern/extern kopreasi | <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Pengurus/Pengawas koperasi calon peserta - Adanya permohonan dari Pengurus/Pengawas dan Manager untuk disuluh. - Koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota se-NTB. - Pembentukan panitia di Kabupaten/Kota - Pelaksanaan penyuluhan | - Adanya Pengurus/Pengawas dan Manager koperasi yang belum memahami bagaimana sistim pengawasan yang baik sesuai petunjuk yang berlaku. | - | 1(satu) hari | 1.UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 2.UU. No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. 3.Perda. No. 1 Tahun 2002 Tentang Perkembangan Koperasi. 4.Perda. NTB No. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB. 5.Pergub. NTB No. 21 Tahun 2008 Tentang Rincian Tupoksi Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB. 6.Angaran Dasar dan angaran rumah tangga koperasi. | |
| 4. | Sosialisasi Pemeringkatan Koperasi. | <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Pengurus/Pengawas koperasi calon peserta - Adanya permohonan dari Pengurus/Pengawas dan Manager untuk disuluh. - Koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota se-NTB. - Pembentukan panitia di Kabupaten/Kota - Pelaksanaan penyuluhan | - Adanya Pengurus/Pengawas dan Manager koperasi yang belum memahami bagaimana sistim pengawasan yang baik sesuai petunjuk yang berlaku. | - | 1 (satu) hari | 1. UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 2. UU. No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. 3. PP. No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. 4. Perda. No. 1 Tahun 2002 Tentang Perkembangan Koperasi. 5. Perda. NTB No. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB. 6. Pergub. NTB No. 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tupoksi Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB. 7. Kepmen Nomor :22/Per/M/IV/2007 tentang pemeringkatan koperasi | |